



**CATATAN atas LAPORAN
KEUANGAN (CaLK)**

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**TAHUN ANGGARAN 2021
KABUPATEN BREBES**

BREBES 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;

- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I			Pendahuluan
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
Bab II			Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab III			Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
	3.1	LRA	

		3.1.1	Pendapatan_LRA		
		3.1.2	Belanja		
	3.2	LO			
		3.2.1	Pendapatan –LO		
		3.2.2	Beban		
		3.2.3	Kegiatan Non Operasional		
		3.2.4	Pos Luar Biasa		
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas			
		3.3.1	Perubahan Ekuitas		
	3.4	Neraca			
		3.4.1	Aset		
		3.4.2	Kewajiban		
		3.4.3	Ekuitas		
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.			
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD				
Bab V	Penutup				

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	120.020.000.000,00	124.425.548.718,00	4.405.548.718,00	103,67%
2	PENDAPATAN TRANSFER			-	
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			-	
	JUMLAH PENDAPATAN	120.020.000.000,00	124.425.548.718,00	4.405.548.718,00	103,67%

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	Pajak Daerah	120.020.000.000,00	124.425.548.718,00	4.405.548.718,00	103,67%
2	Retribusi Daerah			-	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
4	Lain-lain PAD yang Sah			-	
	Jumlah PAD	120.020.000.000,00	124.425.548.718,00	4.405.548.718,00	103,67%

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi pendapatan sebesar Rp. 124.425.548.718,00 dari target yang ditetapkan Rp. 120.020.000.000,00 atau 103,67%.
- 2) Realisasi pendapatan Rp. 4.405.548.718,00 lebih dari anggaran.

2. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	8.568.297.487,00	8.440.577.934,00	(127.719.553,00)	98,51%
2	Belanja Barang dan Jasa	4.743.024.581,00	4.382.140.697,00	(360.883.884,00)	92,39%
3	Belanja Modal	2.051.279.920,00	1.931.711.650,00	(119.568.270,00)	94,17%
	Jumlah	15.362.601.988,00	14.754.430.281,00	(608.171.707,00)	96,04%

Kinerja mengenai anggaran belanja dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.440.577.934,00 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 8.568.297.487,00 atau 98,51 %.
- Realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 4.382.160.697,00 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 4.743.024.581,00 atau 92,39%.
- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.931.711.650,00 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 2.051.279.920,00 atau 94,17%.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 96,04% dari yang dianggarkan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

- Banyak potensi obyek pajak yang belum teridentifikasi, dengan penyelesaian Identifikasi potensi PAD/Pajak Daerah dan Pendataan Potensi;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB-P2 bisa dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat ataupun ketidaktahuan informasi mengenai proses dan tatacara pembayaran PBB-P2, dengan penyelesaian kegiatan sosialisasi melalui media sosial, brosur, baliho untuk menggugah kesadaran masyarakat.
- Masih banyaknya kesenjangan Nilai Jual Objek Pajak dengan harga tanah terkini, dengan penyelesaian Evaluasi dan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120.020.000.000,00	124.425.548.718,00	103,67%	123.161.003.826,00
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan				
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
Jumlah	120.020.000.000,00	124.425.548.718,00	103,67%	123.161.003.826,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020, maka realisasi pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.264.544.892,00 atau 101,03%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp. 120.020.000.000,00 Realisasi sebesar Rp. 124.425.548.718,00 atau 103,67%. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Pajak Daerah	120.020.000.000,00	124.425.548.718,00	103,67	123.161.003.826,00
b. Retribusi daerah				
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
d. Lain-Lain PAD yang sah				
Jumlah	120.020.000.000,00	124.425.548.718,00	103,67	123.161.003.826,00

Realisasi pendapatan dari pajak daerah melebihi target sebesar 103,67% atau realisasi mencapai Rp. 124.425.548.718,00.

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pajak Hotel	300.000.000,00	347.834.423,00	115,94	117.626.800,00
Pajak Restoran	2.825.000.000,00	3.452.737.139,00	122,22	2.427.388.662,00
Pajak Hiburan	175.000.000,00	175.127.470,00	100,07	91.573.950,00
Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.517.961.866,00	117,27	2.708.916.091,00
Pajak Penerangan Jalan	51.100.000.000,00	51.273.016.368,00	100,34	48.654.063.049,00
Pajak Parkir	170.000.000,00	226.220.504,00	133,07	100.784.400,00
Pajak Air Tanah	700.000.000,00	747.087.264,00	106,73	683.163.935,00
Pajak Sarang Burung Walet	-	-		-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	250.000.000,00	475.519.801,00	190,21	166.703.565,00
Pajak Bumi dan Bangunan	40.000.000.000,00	40.812.300.672,00	102,03	35.081.706.997,00
Pajak Lingkungan	-	-		-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	21.500.000.000,00	23.397.743.211,00	108,83	18.581.262.232,00
Jumlah	120.020.000.000,00	124.425.548.718,00	103,67	108.613.189.681,00

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2021 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 14.754.430.281,00 dari anggaran sebesar Rp. 15.362.601.988,00 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Operasi	13.311.322.068,00	12.822.718.631,00	96,33	-
b. Belanja Modal	2.051.279.920,00	1.931.711.650,00	94,17	-
c. Belanja Tak Terduga				-
d. Belanja Transfer				-
Jumlah	15.362.601.988,00	14.754.430.281,00	96,04	-

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dalam Tahun Anggaran 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp. 12.822.718.631,00 dari anggaran sebesar Rp. 13.311.322.068,00. Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Belanja Pegawai	8.568.297.487,00	8.440.577.934,00	98,51	-
Belanja Barang dan Jasa	4.743.024.581,00	4.382.140.697,00	92,39	-
Belanja Bunga				-
Belanja Subsidi				-
Belanja Hibah				-
Belanja Bantuan Sosial				-
Jumlah	13.311.322.068,00	12.822.718.631,00	96,33	-

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Gaji dan Tunjangan	1.813.340.987,00	1.806.863.292,00	99,64	-
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.048.885.500,00	1.031.339.830,00	98,33	-
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.345.663.000,00	4.257.176.812,00	97,96	-
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-			-
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.360.408.000,00	1.345.198.000,00	98,88	-
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-		-
g. Belanja Pegawai BOS	-	-		-
h. Belanja Pegawai BLUD	-	-		-
Jumlah	8.568.297.487,00	8.440.577.934,00	98,51	-

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Barang	1.142.833.081,00	1.030.501.330,00	90,17	-
b. Belanja Jasa	2.382.399.000,00	2.196.155.290,00	92,18	-
c. Belanja Pemeliharaan	254.030.000,00	242.148.120,00	95,32	-
d. Belanja Perjalanan Dinas	963.762.500,00	913.335.957,00	94,77	-
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
f. Belanja Barang dan Jasa BOS				
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD				
J u m l a h	4.743.024.581,00	4.382.140.697,00	92,39	-

- 1) Belanja Barang merupakan belanja barang persediaan sesuai rincian sebagai berikut :

Belanja Barang :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Barang Pakai Habis	1.142.833.081,00	1.030.501.330,00	90,17	-
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai				
c. Belanja Barang Bekas Dipakai				
J u m l a h	1.142.833.081,00	1.030.501.330,00	90,17	-

Rincian Belanja Barang Pakai Habis adalah sebagai berikut:

Belanja Barang :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Belanja Barang Pakai Habis				
1 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				
2 Belanja Bahan-Bahan Kimia				
3 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.000.000,00	43.574.600,00	90,78	-
4 Belanja Bahan-Bahan Baku				
5 Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir				
6 Belanja Bahan-Barang dalam Proses				
7 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				
8 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran				
9 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.340.000,00	3.745.000,00	86,29	-
10 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan				
11 Belanja Bahan-Bahan Lainnya				
12 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				
13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar				
14 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran				
15 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium				
16 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar				
17 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi				
18 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian				
19 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel				
20 Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial				
21 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya				
22 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	183.133.231,00	170.659.030,00	93,19	-

Belanja Barang :		Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	466.373.150,00	449.751.700,00	96,44	-
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	26.719.000,00	25.590.000,00	95,77	-
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender				
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	11.773.700,00	11.766.000,00	99,93	-
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.599.500,00	8.516.000,00	99,03	-
30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	5.300.000,00	4.610.000,00	86,98	-
31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa				
32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga				
33	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	41.189.000,00	41.120.000,00	99,83	-
34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.860.500,00	6.733.000,00	75,99	-
35	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH				
36	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD				
37	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)				
38	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)				
39	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				
40	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	-
41	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)				
42	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)				
43	Belanja Pakaian Penyelamatan				
44	Belanja Pakaian Siaga				
45	Belanja Pakaian Teknik				
46	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja				
47	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium				
48	Belanja Pakaian Kerja Bengkel				
49	Belanja Pakaian KORPRI				
50	Belanja Pakaian Adat Daerah				

Belanja Barang :		Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
51	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.125.000,00	21.000.000,00	99,41	-
52	Belanja Pakaian Olahraga				
53	Belanja Pakaian Paskibraka				
54	Belanja Pakaian Jas/Safari				
55	Belanja Obat-Obatan-Obat				
56	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya				
57	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
58	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				
59	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga				
60	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya				
61	Belanja Natura dan Pakan-Natura	140.030.000,00	128.780.000,00	91,97	-
62	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	134.610.000,00	75.485.000,00	56,08	-
63	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	38.880.000,00	35.271.000,00	90,72	-
64	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				
65	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan				
66	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				
67	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial				
68	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				
69	Belanja Natura dan Pakan-Pakan				
70	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya				
71	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi				
72	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya				
73	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi				
74	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya				
75	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses				
76	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya				
J u m l a h		1.142.833.081,00	1.030.501.330,00	90,17	-

2) Belanja Jasa sebesar Rp. 2.196.155.290,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Jasa :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Jasa Kantor	2.209.359.000,00	2.030.856.730,00	91,92	-
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.400.000,00	3.658.560,00	83,15	-
c. Belanja Sewa Tanah				
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.640.000,00	13.640.000,00	100,00	-
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi				
g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya				
h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				
i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	155.000.000,00	148.000.000,00	95,48	-
j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)				
k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				
n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah				
J u m l a h	2.382.399.000,00	2.196.155.290,00	92,18	-

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 242.148.120,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Pemeliharaan Tanah				
b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.220.000,00	107.278.120,00	90,74	-
c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	135.810.000,00	134.870.000,00	99,31	-
d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
J u m l a h	254.030.000,00	242.148.120,00	95,32	-

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 913.335.957,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas :		Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	963.762.500,00	913.335.957,00	94,77	-
b.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-		-
J u m l a h		963.762.500,00	913.335.957,00	0,95	-

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya serta belanja modal aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.931.711.650,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.051.279.920,00 dengan rincian:

Belanja Modal :		Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a.	Belanja Modal Tanah				
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.310.829.920,00	1.193.546.650,00	91,05	-
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	740.450.000,00	738.165.000,00	99,69	-
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Jumlah		2.051.279.920,00	1.931.711.650,00	94,17	-

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Tanah :		Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
b.	Belanja Modal Tanah BLUD				
Jumlah					

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.193.546.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan Mesin :		Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a.	Belanja Modal Alat Besar	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
b.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-		
c.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-		
d.	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-		
e.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	416.599.800,00	376.767.650,00	90,44	-

Belanja Peralatan dan Mesin :		Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
f.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	91.513.000,00	91.100.000,00	99,55	
g.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-		
h.	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-		
i.	Belanja Modal Komputer	798.217.120,00	721.179.000,00	90,35	-
j.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-		
k.	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-		
l.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-		
m.	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-		
n.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-		
o.	Belanja Modal Alat Peraga	-	-		
p.	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-		
q.	Belanja Modal Rambu-Rambu	-	-		
r.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-		
s.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-		
t.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-		
Jumlah		1.310.829.920,00	1.193.546.650,00	0,91	-

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 738.165.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Gedung dan Bangunan :		Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a.	Belanja Modal Bangunan Gedung	599.450.000,00	597.665.000,00	99,70	
b.	Belanja Modal Monumen				
c.	Belanja Modal Bangunan Menara				
d.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	141.000.000,00	140.500.000,00	99,65	
e.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				
Jumlah		740.450.000,00	738.165.000,00	99,69	-

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020.

Pendapatan-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp. 129.315.063.116,26 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	129.315.063.116,26	-	129.315.063.116,26	-
2. Pendapatan Transfer – LO				
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO				
Jumlah	129.315.063.116,26	-	129.315.063.116,26	-

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2021 adalah sebesar Rp. 129.315.063.116,26 dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan Asli Daerah-LO				
a. Pendapatan Pajak Daerah – LO	129.315.063.116,26	-	129.315.063.116,26	-
b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO				
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO				
d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO				
Jumlah	129.315.063.116,26	-	129.315.063.116,26	-

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Beban				
a. Beban Operasi	16.650.408.089,57	-	(16.650.408.089,57)	
b. Beban Transfer			-	
Jumlah	16.650.408.089,57	-	(16.650.408.089,57)	

Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
BEBAN OPERASI				
a. Beban Pegawai	8.832.124.338,00	-	(8.832.124.338,00)	
b. Beban Persediaan	975.496.830,00	-	(975.496.830,00)	
c. Beban Jasa	2.197.849.666,00	-	(2.197.849.666,00)	
d. Beban Pemeliharaan	242.148.120,00	-	(242.148.120,00)	
e. Beban Perjalanan Dinas	913.335.957,00	-	(913.335.957,00)	
f. Beban Bunga	-	-	-	
g. Beban Subsidi	-	-	-	
h. Beban Hibah	-	-	-	
i. Beban Bantuan Sosial	-	-	-	
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	538.859.452,00	-	(538.859.452,00)	
k. Beban Penyisihan Piutang	2.950.593.726,57	-	(2.950.593.726,57)	
l. Beban Lain-lain	-	-	-	
Jumlah	16.650.408.089,57	-	(16.650.408.089,57)	

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap tahun 2021 adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | Rp 448.981.913,00 |
| b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | Rp 36.077.539,00 |

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2021 berupa amortisasi software sebesar Rp. 53.800.000,00. Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2021 sebagai berikut :

Nama Software	Umur s.d 2021	Nilai Software	Amortisasi per tahun (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2020 (Rp)	Beban Amortisasi 2021 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2021 (Rp)
Aplikasi Software SIMPATDA	10	79.660.000,00	15.932.000	79.660.000,00		79.660.000,00
Oracle 11g Standard+Form, Oracle Database Standar Edition+ATS, Oracle Internet Developer Suite+ATS	9	147.500.000,00	29.500.000	147.500.000,00		147.500.000,00
Map Info (Software)	9	36.850.000,00	7.370.000	36.850.000,00		36.850.000,00
Adobe lightroom	8	4.000.000,00	800.000	4.000.000,00		4.000.000,00
Office Home and Business	8	32.600.000,00	6.520.000	32.600.000,00		32.600.000,00
Windows Operating System	8	18.150.000,00	3.630.000	18.150.000,00		18.150.000,00
Earth Profesional	8	9.920.000,00	1.984.000	9.920.000,00		9.920.000,00
Map Info 12	8	36.900.000,00	7.380.000	36.900.000,00		36.900.000,00
Anti Virus 6 User	8	6.100.000,00	1.220.000	6.100.000,00		6.100.000,00
SIM BPHTB	2	79.500.000,00	15.900.000	15.900.000,00	15.900.000	31.800.000,00

Nama Software	Umur s.d 2021	Nilai Software	Amortisasi per tahun (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2020 (Rp)	Beban Amortisasi 2021 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2021 (Rp)
Aplikasi SIPENTOL	1	94.500.000,00	18.900.000	-	18.900.000	18.900.000,00
Aplikasi E-Potensi	1	95.000.000,00	19.000.000	-	19.000.000	19.000.000,00
						-
Jumlah		640.680.000,00		387.580.000,00	53.800.000	441.380.000

Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp. 2.950.593.726,57 terdiri dari:

Beban Penyisihan Piutang :	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.026.527.918,02
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	924.065.808,55
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
Jumlah	2.950.593.726,57

3.2.3. Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
SURPLUS NON OPERASIONAL – LO				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	19.315.959,93	-	19.315.959,93	
JUMLAH	19.315.959,93	-	19.315.959,93	
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
JUMLAH	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO	17.815.959,93	-	17.815.959,93	

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL.

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020.

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 18.159.108.262,11** berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 ditambah Surplus-LO TA 2021 sebesar **Rp. 112.682.470.986,62** ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar **Rp. 15.147.755.712,49** dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar minus **Rp. 109.671.118.437,00**.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut :

Uraian	2021(Rp)	2020(Rp)
Koreksi Nilai Persediaan		-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-
Koreksi Ekuitas Lainnya	15.147.755.712,49	
Jumlah	15.147.755.712,49	-

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 15.147.755.712,49 merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya (Rp. 18.533.806.783,74 – Rp. 3.386.051.071,25) sesuai jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2021(Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	17.902.944.821,10
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	1.323.426.919,00
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	63.600.000,00
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi masuk antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR+MM	
Koreksi saldo awal (inventarisasi barang belum tercatat/berlebih) - KOR+LBH	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah masuk tahun-tahun sebelumnya) - KOR+HBM	
Koreksi saldo awal Aset tetap (atribusi nilai sertifikat tanah tahun-tahun sebelumnya) - KOR+SER	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hilang pencatatan) - KOR+HCTT	
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi) - KOR+/-TKAP	
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi) - KOR+NKAP	

Uraian	2021(Rp)
Koreksi saldo awal (pencatatan penilaian barang hasil inventarisasi) - KOR+NILAI	
Koreksi saldo awal tambah (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari Dinarpus- MM	114.850.000,00
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari Sekretariat DPRD - MM	416.790.000,00
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari Sekretariat Daerah - MM	208.330.000,00
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari Satpol PP - MM	242.850.000,00
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari Disdukcapil - MM	60.000.000,00
Penyesuaian akumulasi penyusutan penghapusan aset tetap	
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi keluar aset tetap	
Mutasi Masuk Barang Rusak Berat antar SKPD	
Pencatatan Koreksi Saldo Awal Piutang	(1.798.984.956,36)
Pencatatan Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Jasa Ex-Dana Bergulir	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Pokok Ex-Dana Bergulir	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Denda keterlambatan	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang TGR karena setoran atau pengurangan nilai piutang TGR	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Denda Pajak	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Retribusi	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang BLUD	
Koreksi saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya karena	
Mutasi masuk barang persediaan dari SKPD/Unit ...	
Reklasifikasi persediaan ke ekstrakomtabel	
Koreksi saldo awal kas	
Pengembalian piutang POKOK ex-Dana Bergulir Dinas Koperasi, penerimaan kas di PPKD piutang dicatat di Dinas Koperasi	
Pengembalian piutang POKOK ex-Dana Bergulir kepada masyarakat, penerimaan kas di PPKD piutang dicatat di SKPD pengelola (non Dinas Koperasi)	
Penyesuaian penyisihan piutang atas penerimaan piutang TGR Khusus PPKD	
Koreksi Saldo Awal Utang Lebih Bayar DBH Pusat	
Pengurangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pusat	
Pengurangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	
Pengurangan penyisihan piutang bagian laba/deviden atas PMPD pada BUMD	
Jumlah	18.533.806.783,74

2. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2021(Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Kewajiban/Utang/Pendapatan Diterima Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	2.472.158.178,25
Koreksi saldo awal Aset tetap (penghapusan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HPS	
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi keluar antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR-MUT	

Uraian	2021(Rp)
Koreksi saldo awal Aset tetap (perubahan batas nilai kapitalisasi) - KOR-NKAP	
Koreksi saldo awal kurang (pemeliharaan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-PEMEL	
Koreksi saldo awal Aset tetap (dobel pencatatan) - KOR-DOB	
Koreksi saldo awal Aset tetap (seharusnya merupakan barang habis pakai tahun-tahun sebelumnya) - KOR-BHP	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah keluar tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HB	
Koreksi saldo awal kurang (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Koreksi saldo awal kurang (pengurangan nilai KDP)	
Reklasifikasi aset tetap ke Ekstracomptable (E)	
Pencatatan mutasi keluar aset tetap ke OPD - MUT	
Penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) - HPS	
Koreksi saldo akumulasi penyusutan awal Aset tetap	
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi masuk aset tetap	913.892.893,00
Koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD) karena	
Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Barang RB/TD	
Koreksi saldo awal Akumulasi Amortisasi ATB	
Mutasi Keluar Barang Rusak Berat antar SKPD	
Penghapusan Aset Lain-Lain - Aset Tidak Berwujud Software	
Pengembalian pokok ex-Dana Bergulir, penerimaan kas di PPKD	
Koreksi saldo awal utang belanja karena	
Mutasi keluar barang persediaan ke SKPD/Unit	
Reklasifikasi persediaan ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
Koreksi saldo awal beban dibayar di muka	
Penyesuaian saldo awal Pendapatan diterima di muka	
Jumlah	3.386.051.071,25

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
ASET		
Aset Lancar	18.055.756.977,46	-
Aset Tetap	2.717.246.224,00	-
Aset Lainnya	199.300.000,00	-
Jumlah Aset	20.972.303.201,46	-
KEWAJIBAN & EKUITAS		
Kewajiban	2.813.194.939,35	-
Ekuitas	18.159.108.262,11	-
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	20.972.303.201,46	-

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Kas		
Piutang	33.870.884.611,94	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(15.870.132.134,48)	
Persediaan	55.004.500,00	
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	18.055.756.977,47	-

A. KAS

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan rincian sesuai tabel berikut:

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
KAS		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Jumlah	-	-

B. PIUTANG

Saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 33.870.884.611,94 dengan rincian:

Jenis Piutang	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Pendapatan :		
Piutang Pajak Daerah	28.472.033.647,50	-
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.398.850.964,44	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya :		
Piutang Lainnya		
Jumlah	33.870.884.611,94	-

1) Piutang Pendapatan

a) Piutang Pajak Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah sebesar Rp. 28.472.033.647,50 dengan rincian sesuai tabel berikut :

Piutang Pajak :	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Pajak Hotel		
Piutang Pajak Restoran		
Piutang Pajak Hiburan		
Piutang Pajak Reklame	249.926.844,00	
Piutang Pajak Penerangan Jalan		
Piutang Pajak Parkir		
Piutang Pajak Air Tanah	78.595.852,50	
Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.135.956.842,00	
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.554.109,00	
Piutang Pajak Lingkungan		
Jumlah	28.472.033.647,50	-

Mutasi Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal Piutang Pajak	-
Penambahan :	
a. Penambahan piutang atas transaksi tahun 2021	69.370.697.489,50
b. Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu	-
c. dst	
Pengurangan :	
a. Setoran piutang tahun berjalan	40.874.447.642,00
b. Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu	24.216.200,00
c..... dst	
Saldo Akhir Piutang Pajak	28.472.033.647,50

Rincian Mutasi Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut :

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Penambahan piutang transaksi 2021		
a. Piutang pajak reklame	391.698.274,00	
b. Piutang pajak air tanah	123.156.752,50	
c. Piutang pajak PBB-P2	68.848.288.354,00	
d. Piutang BPHTB	7.554.109,00	
Jumlah	69.370.697.489,50	

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Setoran piutang tahun berjalan		
a. Piutang pajak reklame	119.623.430,00	
b. Piutang pajak air tanah	42.492.700,00	
c. Piutang pajak PBB-P2	40.712.331.512,00	
Jumlah	40.874.447.642,00	

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu		
a. Piutang pajak reklame	22.148.000,00	(koreksi lebih catat)
b. Piutang pajak air tanah	2.068.200,00	(koreksi lebih catat)
c. Piutang pajak		
Jumlah	24.216.200,00	

b) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum diterima. Saldo piutang dimaksud adalah Rp. 5.398.850.964,44. Rincian Piutang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		
Piutang Jasa Giro		
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
Piutang Pendapatan Bunga		
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		
Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.398.850.964,44	-
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		
Piutang Pendapatan BLUD		
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		
Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		
Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya		
Jumlah	5.398.850.964,44	-

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp. 5.398.850.964,44 merupakan piutang kepada wajib pajak atas denda keterlambatan pembayaran pajak. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	Tahun Pajak	Nilai (Rp)
1	PBB-P2	2014	345.729.822,30
2	PBB-P2	2015	461.546.177,70
3	PBB-P2	2016	530.530.035,60
4	PBB-P2	2017	363.306.108,30
5	PBB-P2	2018	739.709.573,40
6	PBB-P2	2019	1.058.126.520,24
7	PBB-P2	2020	1.282.728.134,10
8	PBB-P2	2021	617.174.592,80
	Jumlah		5.398.850.964,44

C. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dirinci sesuai penjelasan berikut :

1) Penyisihan Piutang Pendapatan

Jenis Piutang	Th. 2021	Th. 2020
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(11.668.102.370,60)	-
Penyisihan Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(4.202.029.763,87)	
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		
Jumlah	(15.870.132.134,47)	-

2) Penyisihan Piutang Lainnya

Jenis Piutang	Th. 2021	Th. 2020
Penyisihan Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka		
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Jumlah	-	-

D. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rekening ini merupakan biaya yang belum merupakan kewajiban Pemkab Brebes untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Saldo sebesar Rp. 0,00.

E. PERSEDIAAN

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Persediaan :	Th. 2021	Th. 2020
Bahan	-	-
Suku Cadang	-	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	55.004.500,00	-
Obat-obatan	-	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga	-	-
Natura dan Pakan	-	-
Persediaan Penelitian	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-
Persediaan Barang BOS	-	-
Jumlah	55.004.500,00	-

Penambahan dan pengurangan selama tahun 2021 dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan :	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Bahan				-
Suku Cadang				-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	1.030.501.330,00	975.496.830,00	55.004.500,00
Obat-obatan				-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga				-
Natura dan Pakan				-
Persediaan Penelitian				-
Persediaan Dalam Proses				-
Persediaan Barang BOS				-
Jumlah	-	1.030.501.330,00	975.496.830,00	55.004.500,00

Mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2021 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Penambahan :	Nilai (Rp)
SALDO AWAL	
Koreksi (+) Saldo Awal	
Pengadaan / Pembelian	1.030.501.330,00
Reklas Dari Belanja Tdk Terduga	
Reklas Dari B. Modal	
Reklas Dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Reklas Dari B. Pegawai	
Reklas Dari B. Jasa	
Reklas Dari Pemeliharaan	
Mutasi / Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Hutang Persediaan	
Reklas Antar Beban Persediaan (+)	
Jumlah Penambahan	1.030.501.330,00
Koreksi (-) Saldo Awal	
Pemakaian	975.496.830,00
Mutasi Keluar	
Hibah Keluar	
Reklas Ke Aset Tetap	
Reklas Ke Ekstrakomtabel	
Reklas Ke Belanja Pegawai	
Reklas Ke Belanja Jasa	
Reklas Ke Belanja Pemeliharaan	
Pindah Ke Kadaluarsa/-Rusak	
Reklas Antar Beban Persediaan (-)	
Jumlah Pengurangan	975.496.830,00
SALDO AKHIR PERSEDIAAN	55.004.500,00

F. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 2.717.246.224,00 dan Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	Th. 2021	Th. 2020
a. Tanah		
b. Peralatan dan Mesin	5.548.630.593,00	
c. Gedung dan Bangunan	1.844.204.000,00	
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
e. Aset Tetap Lainnya	-	
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	199.200.000,00	
g. Akumulasi Penyusutan	(4.874.788.369,00)	
Jumlah Aset Tetap	2.717.246.224,00	-

Mutasi aset tetap tahun 2021 sebagai berikut :

URAIAN JENIS	SALDO 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2021
a. Tanah				
b. Peralatan dan Mesin		5.739.630.593,00	191.000.000,00	5.548.630.593,00
c. Gedung dan Bangunan		2.093.164.000,00	248.960.000,00	1.844.204.000,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan				-
e. Aset Tetap Lainnya				-
f. Konstruksi dalam Pekerjaan				199.200.000,00
JUMLAH	-	7.832.794.593,00	439.960.000,00	7.592.034.593,00

- 1) Rincian mutasi penambahan aset tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Penambahan :	
1	Belanja Modal	1.931.711.650,00
2	Reklas Dari B. Pegawai	
3	Reklas Dari B. Jasa	9.240.000,00
4	Reklas Dari B. Persediaan	
5	Reklas Dari B. Pemeliharaan	
6	Reklas Dari Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ke-3	
7	Hibah Masuk (Pemerintah Pusat)	
8	Hibah Masuk (Pemerintah Provinsi)	
9	Hibah Masuk (Pihak Ke-3)	
10	Hibah Masuk (Komite Sekolah)	
11	Mutasi Masuk	1.042.820.000,00
12	Hutang Aset	
13	Reklas Dari Aset Lainnya (Rusak Berat)	
14	Reklas Dari Aset Lainnya (Detail Engineering)	
15	Reklas Aset Tetap Dari KDP	
16	Koreksi Tambah (Mutasi Masuk Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih)	
18	Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun Sebelumnya)	
19	Koreksi Tambah (Atribusi Nilai Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya)	
20	Koreksi Tambah (Hilang Pencatatan)	
21	Koreksi Tambah (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
22	Koreksi Tambah (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
23	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
24	Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap)	
25	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Detail Engineering Ke Aset Tetapnya Tahun Sebelumnya)	
26	Koreksi Tambah (.....)	
	Jumlah Penambahan	2.983.771.650,00

Penjelasan :

- Pengadaan melalui belanja modal tahun 2021 senilai Rp. 1.931.711.650,00
- Reklas dari Belanja Jasa senilai Rp. 9.240.000,00 merupakan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa yang kemudian diatribusi ke aset tetap.
- Mutasi masuk dari Dinarpus berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Daihatsu/Xenia VVTI) senilai Rp. 114.850.000,00
- Mutasi masuk dari Sekretariat DPRD berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Nissan/X-TRAIL 2.5 A/T) senilai Rp. 416.790.000,00
- Mutasi masuk dari Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Toyota Rush 1.5 M/T) senilai Rp.

208.330.000,00

- f) Mutasi masuk dari Satpol PP berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Toyota Rush G 1.5 Automatic) senilai Rp. 242.850.000,00
- g) Mutasi masuk dari Disdukcapil berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Toyota Kijang SPR LG/KF80) senilai Rp. 60.000.000,00

2) Rincian **mutasi pengurangan** aset tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pengurangan :	
1	Extrakomtable	1.500.000,00
2	Reklas Ke B. Persediaan	
3	Reklas Ke B. Pemeliharaan	
4	Reklas Ke B. Perjalanan Dinas	
5	Reklas Ke B. Pegawai	
6	Reklas Ke B. Jasa	
7	Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang	
8	Hibah Keluar	
9	Mutasi Keluar	
10	Reklas Dari Kdp Ke Aset Tetap	
11	Rusak Berat (RB)	
12	Tidak Ditemukan (TD)	
13	Penghapusan Barang B/RR	
14	Reklas Ke Aset Tidak Berwujud (ATB)	189.500.000,00
15	Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya)	
16	Koreksi Kurang (Mutasi Keluar Antar Opd Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Kurang (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
18	Koreksi Kurang (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
19	Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
20	Koreksi Kurang (Pemeliharaan Tahun Sebelumnya)	
21	Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan)	
22	Koreksi Kurang (BHP Tahun Sebelumnya)	
23	Koreksi Kurang (Hibah Keluar Tahun Sebelumnya)	
24	Koreksi Kurang (.....)	
	Jumlah Pengurangan	191.000.000,00

Penjelasan :

- a) Aset Tetap yang direklasifikasi ke dalam barang-barang ekstrakomtable, berupa pembelian jam dinding sebanyak 10 unit @ Rp. 150.000,00
- b) Aset Tetap yang direklasifikasi ke dalam Aset Tidak Berwujud (ATB) berupa pengadaan software SIPENTOL senilai Rp. 94.500.000,00 dan E-Potensi senilai Rp. 95.000.000,00

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. 199.200.000,00 dan Rp. 0,00. Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Kemajuan Fisik (%)	Nominal KDP (Rp)	Nominal Terhutang (Rp)
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor	CV. FAUZ	020/X/112/2021	199.200.000,00	50%	199.200.000,00	
Jumlah					199.200.000,00	-

Penjelasan :

Pekerjaan tersebut bersumber dana dari APBD dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari. Nilai kontrak sebesar Rp. 199.200.000, nilai KDP tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp. 199.200.000,00 dan nilai terhutang sebesar Rp. 0,00.

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2021 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		4.543.306.202,00	-	4.543.306.202,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		331.482.167,00	-	331.482.167,00
				-
Jumlah	-	4.874.788.369,00	-	4.874.788.369,00

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Beban Penyusutan	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Jumlah Penambahan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	448.981.913,00		3.180.431.396,00	913.892.893,00	4.543.306.202,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.077.539,00		295.404.628,00		331.482.167,00
Jumlah	485.059.452,00	-	3.475.836.024,00	913.892.893,00	4.874.788.369,00

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah				

G. DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan Tahun 2021 sebesar NIHIL

H. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 199.300.000,00 dan Rp. NIHIL dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud	640.680.000,00	
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(441.380.000,00)	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah	199.300.000,00	-

1. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp. 640.680.000,00. Saldo tersebut berupa software/aplikasi.

Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

- Pengadaan software/aplikasi tahun 2021 sebesar Rp. 189.500.000,00
- Mutasi masuk dari BPKAD karena ada perubahan SOTK Rp. 451.180.000,00

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 441.380.000,00

Mutasi terdiri atas :

- a. Mutasi masuk Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari BPKAD karena ada perubahan SOTK tahun 2021 sebesar Rp. 387.580.000,00
- b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp. 53.800.000,00

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan saldo masing-masing sebesar Rp. 2.813.194.939,35 dan Rp. 0,00 dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka	973.384.983,35	
Utang Belanja	1.839.809.956,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah	2.813.194.939,35	-

1. *Pendapatan Diterima Dimuka*

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 973.384.983,35.

Uraian Pendapatan Diterima di Muka	Saldo Th. 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2021
Pendapatan Pajak Reklame		2.008.076.563,94	1.034.829.002,25	973.247.561,69
Pendapatan Pajak Restoran		137.421,66		137.421,66
Jumlah		2.008.213.985,60	1.034.829.002,25	973.384.983,35

Mutasi pendapatan diterima dimuka tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Uraian Kegiatan :	
Penerimaan pendapatan pajak reklame dan pajak restoran, diterima pada tahun 2021 untuk jangka waktu s.d tahun 2022.	
Saldo Awal	
Penambahan :	
a. Penambahan PDDM tahun 2021	973.384.983,35
b. Mutasi masuk dari BPKAD karena adanya perubahan SOTK	1.034.829.002,25
Jumlah Penambahan	2.008.213.985,60
Pengurangan :	
a. PDDM tahun sebelumnya yang telah menjadi pendapatan tahun 2021	1.034.829.002,25
b. Koreksi kurang salah catat saldo tahun sebelumnya	
Jumlah Pengurangan	1.034.829.002,25
Saldo Akhir	973.384.983,35

2. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.839.809.956,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Utang Belanja Pegawai	1.834.023.904,00	-
Utang Belanja Barang dan Jasa - Persediaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Pemeliharaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Jasa	5.786.052,00	
Utang Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas		
Utang Belanja Bunga		
Utang Belanja Subsidi		
Utang Belanja Hibah		
Utang Belanja Tidak Terduga		
Utang Belanja Bagi Hasil		
Utang Belanja Bantuan Keuangan		
Utang Belanja Bantuan Sosial		
Utang Beban Lain-lain		
Jumlah	1.839.809.956,00	-

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2021 sebesar Rp. 95.492.678,00
 - 2) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp. 1.738.531.226,00
 - 3) Serah terima dari BPKAD karena perubahan SOTK sebesar Rp. 1.433.237.500,00
- b. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - 1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp. 33.345,00
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar Rp. 375.300,00
 - 3) Utang atas belanja Listrik sebesar Rp. 1.677.407,00
 - 4) Utang atas belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp. 3.700.000,00
 - 5) Serah terima dari BPKAD karena perubahan SOTK sebesar Rp. 4.091.676,00

2. Pengurangan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV sebesar Rp. 1.433.237.500,00
- b. Utang Belanja Jasa merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - 1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp. 59.576,00
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar Rp. 332.100,00
 - 3) Utang atas belanja Jasa Tenaga Administrasi bulan sebesar Rp. 3.700.000,00

3. *Utang Jangka Pendek Lainnya*

- 1. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing NIHIL.

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyetor kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar NIHIL.

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 18.159.108.262,11 dan Rp. 0,00. Perubahan atas ekuitas tahun 2021 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2021 :	NILAI (Rp)
EKUITAS AWAL	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	112.682.470.986,62
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Ekuitas	15.147.755.712,49
KEBIJAKAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(109.671.118.437,00)
EKUITAS AKHIR	18.159.108.262,11

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 109.671.118.437,00. Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp. 112.664.655.026,69 sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp. 2.993.536.589,69. Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan hubungan LRA-LO dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA	109.671.118.437,00
Penambahan	50.270.601.509,61
Pengurangan	47.277.064.919,92
Surplus/(Defisit) LO	112.664.655.026,69

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan LRA-LO:

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
1	aset tetap	Jurnal reklasifikasi beban jasa ke aset tetap PEG+	
2	aset tetap	Jurnal reklasifikasi beban jasa ke aset tetap JS+	9.240.000,00
3	aset tetap	Jurnal pengeluaran persediaan reklasifikasi ke Aset Tetap BHP+	
4	aset tetap	Jurnal reklasifikasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap PEMEL+	
5	aset tetap	Jurnal pengeluaran persediaan diserahkan kepada pihak ke-3 direklasifikasi ke Aset Tetap BHP+3	
6	aset lainnya	Jurnal reklasifikasi beban jasa ke aset tidak berwujud	
7	piutang	Jurnal pencatatan Piutang Jaminan Pelaksanaan (baru)	
8	piutang	Jurnal pencatatan Piutang Denda Keterlambatan	
9	piutang	Jurnal pencatatan pembebanan Piutang TGR th 2021 a.n (SK Bupati No.....)	
10	piutang	Jurnal pencatatan Piutang Pajak baru	43.198.032.504,00
11	piutang	Jurnal pencatatan Piutang Denda Pajak PBB-P2	2.604.454.677,36
12	piutang	Jurnal pencatatan Piutang Retribusi baru	
13	piutang	Jurnal pencatatan Piutang BLUD tahun ini (baru)	
14	utang beban	Jurnal pembayaran utang belanja tahun lalu	1.437.329.176,00
15	persediaan	Jurnal saldo akhir Persediaan Tahun 2021	55.004.500,00
16	persediaan	Jurnal mutasi keluar barang persediaan ke SKPD/Unit	
17	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok individu (tambah)	
18	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok masyarakat (tambah)	
19	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) (tambah)	
20	persediaan	Jurnal penerimaan persediaan karena reklasifikasi antar beban (tambah)	
21	persediaan	Jurnal pengeluaran persediaan karena reklasifikasi antar beban (tambah)	
22	persediaan	Jurnal reklasifikasi antar kode beban persediaan (tambah)	
23	persediaan	Jurnal reklasifikasi persediaan ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
24	BBDM	Jurnal penyesuaian Beban Jasa tahun ini yang merupakan Belanja Dibayar di Muka	
25	BBDM	Jurnal penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka saldo tahun lalu yang telah menjadi Pendapatan -LO	1.034.829.002,25

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
26	beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban pegawai BOS (tambah)	
27	beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban barang dan jasa BOS (non persediaan) (tambah)	
28	beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban persediaan BOS (tambah)	
29	beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban pegawai BLUD (tambah)	
30	beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD (non persediaan) (tambah)	
31	beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban persediaan BLUD (tambah)	
32	beban	Jurnal reklasifikasi antar beban karena salah penganggaran (tambah)	
33	eliminasi hutang/piutang	Jurnal eliminasi Hutang/Piutang Pelayanan Kesehatan Jamkesda (SKTM)	
34	penjualan AT PPKD	Jurnal Reklasifikasi hasil penjualan aset tetap SKPD (tambah)	
35	PMPD	Jurnal pencatatan Penyesuaian saldo PMPD th 2021 akibat perhitungan dengan metode ekuitas	
36	Utang Jangka Pendek	Jurnal eksekusi jaminan pemeliharaan (retensi) dari utang jangka pendek ke pendapatan hasil eksekusi jaminan PPKD	
37	Beban Tidak Terduga	Jurnal pengalihan Belanja Tidak Terduga PPKD ke Beban Persediaan SKPD teknis	
38	Utang DBH Pusat	Jurnal pemotongan pendapatan DBH pusat untuk pembayaran Utang Lebih Bayar DBH	
39	Piutang DBH Pusat	Jurnal penetapan Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai PMK ...	
40	Piutang DBH Pusat	Jurnal penetapan Piutang Bagi Hasil SDA Pusat sesuai PMK ...	
41	Piutang DBH Prov	Jurnal penetapan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi TA 2021 sesuai BA Rekonsiliasi Nomor	
42	Piutang Bagian Laba BUMD	Jurnal pencatatan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Lembaga Keuangan TA 2021	
43	Piutang Bagian Laba BUMD	Jurnal pencatatan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Aneka Jasa (non lembaga keuangan)TA 2021	
44		Belanja Modal Tahun 2021	1.931.711.650,00
		Jumlah	50.270.601.509,61

Pengurangan LRA-LO:

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
1	aset tetap	Jurnal pencatatan hibah masuk aset tetap dari pemerintah pusat (.....) HBM+P	
2	aset tetap	Jurnal pencatatan hibah masuk aset tetap dari pemerintah provinsi (.....)HBM+V	

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
3	aset tetap	Jurnal pencatatan hibah masuk aset tetap dari pihak ke-3 (.....) HBM+3	
4	aset tetap	Jurnal pencatatan hibah masuk aset tetap dari komite sekolah HBM+KOM	
5	aset tetap	Jurnal penerimaan persediaan dari reklasifikasi Belanja Modal - BHP-	
6	aset tetap	Jurnal penerimaan persediaan dari reklasifikasi Aset Tetap (hasil mutasi dari SKPD/Unit lainnya) - BHP-	
7	aset tetap	Jurnal reklasifikasi Belanja Modal/Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan - PEMEL-	
8	aset tetap	Jurnal reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Perjalanan Dinas - PD-	
9	aset tetap	Jurnal reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Pegawai - PEG-	
10	aset tetap	Jurnal reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Jasa - JS-	
11	aset tetap	Jurnal Hibah Keluar Aset Tetap kepada (BAST No.....) - HB	
12	aset tetap	Jurnal reklasifikasi barang diserahkan kepada pihak ke-3 pengadaan tahun 2020, salah penganggaran ke Belanja Modal - HB-3	
13	penyusutan AT	Jurnal pencatatan Beban Penyusutan tahun 2021	485.059.452,00
14	penyusutan AT	Jurnal reklasifikasi antar beban penyusutan, salah kode rekening	
15	aset lainnya	Jurnal pencatatan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	53.800.000,00
16	aset lainnya	Jurnal Penghapusan Aset Tetap atas penjualan barang RB (SK hapus no..... SK jual no)	
17	aset lainnya	Jurnal Penghapusan Aset Tetap atas pemusnahan barang RB (SK hapus no..... SK jual no)	
18	aset lainnya	Jurnal Penghapusan Aset Tetap Rusak Berat tukar/menukar (SK hapus no.....)	
19	aset lainnya	Jurnal Penghapusan Aset Lainnya atas barang HIBAH keluar (SK hapus no..... BAST no)	
20	piutang	Jurnal pengembalian piutang jasa ex-Dana Bergulir, penerimaan kas di PPKD	
21	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Jasa Ex-Dana Bergulir	
22	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Pokok Ex-Dana Bergulir	
23	piutang	Jurnal penerimaan Piutang Jaminan Pelaksanaan, penerimaan kas di PPKD	
24	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Denda keterlambatan	
25	piutang	Jurnal pengurangan Bagian Lancar TGR, penerimaan kas di PPKD	
26	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Beban Penyisihan Piutang TGR	
27	piutang	Jurnal penerimaan piutang pajak tahun lalu	40.974.416.802,00

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
28	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Pajak	2.026.527.918,02
29	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Denda Pajak	924.065.808,55
30	piutang	Jurnal penerimaan piutang retribusi tahun lalu	
31	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Retribusi	
32	piutang	Jurnal penerimaan Piutang BLUD saldo tahun lalu	
33	piutang	Jurnal pengurangan Piutang BLUD yang tidak lolos verifikasi	
34	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penyisihan Piutang BLUD	
35	utang beban	Jurnal pencatatan utang belanja tahun ini yang belum dibayar (non persediaan)	1.839.809.956,00
36	utang beban	Jurnal pencatatan utang belanja tahun ini yang belum dibayar (persediaan)	
37	persediaan	Jurnal koreksi saldo persediaan awal	
38	persediaan	Jurnal penggunaan/pemakaian saldo Persediaan awal	
39	persediaan	Jurnal mutasi masuk barang persediaan dari SKPD/Unit ...	
40	persediaan	Jurnal reklasifikasi persediaan ke ekstrakomtabel	
41	persediaan	Jurnal hibah masuk barang persediaan dari pemerintah pusat	
42	persediaan	Jurnal hibah masuk barang persediaan dari pemerintah provinsi	
43	persediaan	Jurnal hibah masuk barang persediaan dari lembaga/organisasi swasta	
44	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok individu (kurang)	
45	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok masyarakat (kurang)	
46	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) (kurang)	
47	persediaan	Jurnal penerimaan persediaan karena reklasifikasi antar beban (kurang)	
48	persediaan	Jurnal pengeluaran persediaan karena reklasifikasi antar beban (kurang)	
49	persediaan	Jurnal reklasifikasi antar kode beban persediaan (kurang)	
50	persediaan	Jurnal Penerimaan Beban Persediaan SKPD dari Belanja Tidak Terduga PPKD	
51	BBDM	Jurnal penyesuaian Belanja Dibayar di Muka tahun lalu yang telah menjadi Beban Jasa	
52	PPDM	Jurnal penyesuaian Pendapatan -LO tahun ini yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka	973.384.983,35
53	Beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban pegawai BOS (kurang)	
54	Beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban barang dan jasa BOS (non persediaan) (kurang)	

No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
55	Beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban persediaan BOS (kurang)	
56	Beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban pegawai BLUD (kurang)	
57	Beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD (non persediaan) (kurang)	
58	Beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban persediaan BLUD (kurang)	
59	Beban	Jurnal reklasifikasi antar beban karena salah penganggaran (kurang)	
60	Kas	Jurnal penyesuaian atas setoran kas di bendahara penerimaan ke Kas Daerah	
61	eliminasi hutang/piutang	Jurnal eliminasi Hutang/Piutang Pelayanan Kesehatan Jamkesda (SKTM)	
62	Penjualan AT PPKD	Jurnal Reklasifikasi hasil penjualan aset tetap SKPD (kurang)	
63	Penerimaan TGR PPKD	Jurnal penerimaan piutang TGR Khusus PPKD	
64	Penerimaan TGR PPKD	Jurnal penerimaan aset lainnya TGR Khusus PPKD	
65	Utang DBH Pusat	Jurnal pencatatan Utang Lebih Bayar DBH sesuai Perdirjen PK no	
66	Piutang DBH Pusat	Jurnal penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat	
67	Piutang DBH Pusat	Jurnal penerimaan Piutang Bagi Hasil SDA Pusat	
68	Penyisihan Piutang DBH Pusat	Jurnal pencatatan Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak/SDA Pusat	
69	Piutang DBH Prov	Jurnal penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	
70	Penyisihan Piutang DBH Prov	Jurnal pencatatan Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	
71	Piutang Bagian Laba BUMD	Jurnal penerimaan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Lembaga Keuangan TA 2020	
72	Piutang Bagian Laba BUMD	Jurnal penerimaan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Aneka Jasa (non lembaga keuangan) TA 2020	
73	Penyisihan Piutang Laba BUMD	Jurnal pencatatan penyisihan piutang bagian laba/deviden atas PMPD pada BUMD	
		dst	
		Jumlah	47.277.064.919,92

3.5.1 Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	129.315.063.116,26	124.425.548.718,00	4.889.514.398,26
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			-
Jumlah	129.315.063.116,26	124.425.548.718,00	4.889.514.398,26

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
PENDAPATAN ASLI DAERAH	129.315.063.116,26	124.425.548.718,00	(4.889.514.398,26)

a. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Pajak Daerah	129.315.063.116,26	124.425.548.718,00	(4.889.514.398,26)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang pajak th. 2021	45.802.487.181,36
Pendapatan diterima di muka tahun lalu	1.034.829.002,25
Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya	(40.974.416.802,00)
Pendapatan diterima di muka tahun ini	(973.384.983,35)
Selisih	4.889.514.398,26

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Retribusi Daerah			

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			

d. Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain PAD yang Sah			

2. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Antar Daerah			

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

a. Pendapatan Hibah

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hibah-LO			

b. Dana Darurat

Selisih antara Dana Darurat-LO dengan Dana Darurat-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Dana Darurat-LO			

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Selisih antara Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO dengan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO			

4. SURPLUS NON OPERASIONAL

a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

1) Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

2) Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

3) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

4) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO			

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

1) Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			

2) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			

3) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			

4) Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO			

5) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			

3.2.2 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

3.2.2.1 BEBAN OPERASI

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai	8.832.124.338,00	8.440.577.934,00	(391.546.404,00)
Beban Barang dan Jasa	4.328.830.573,00	4.382.140.697,00	53.310.124,00
Beban Bunga			-
Beban Subsidi			-
Beban Hibah			-
Beban Bantuan Sosial			-
Beban Penyisihan Piutang	2.950.593.726,57		(2.950.593.726,57)
Beban Lain-lain	538.859.452,00		(538.859.452,00)
Jumlah	16.650.408.089,57	12.822.718.631,00	(3.827.689.458,57)

1. Beban Pegawai

Selisih Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.806.863.292,00	1.806.863.292,00	0,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN th. 2021	-
Penambahan koreksi catat ...	-
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN	-
Pengurangan koreksi catat ...	-
Selisih	-

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.126.832.508,00	1.031.339.830,00	95.492.678,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN th. 2021	95.492.678,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	95.492.678,00

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.120.948.538,00	4.257.176.812,00	136.228.274,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN th. 2021	1.297.009.226,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.433.237.500,00
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	(136.228.274,00)

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan DPRD th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.786.720.000,00	1.345.198.000,00	441.522.000,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH th. 2021	441.522.000,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	441.522.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Selisih beban barang dan jasa pada LO dengan belanja barang dan jasa pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang	975.496.830,00	1.030.501.330,00	(55.004.500,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Saldo Awal	
Penambahan Reklas dari Belanja Tak Terduga	
Penambahan Reklas Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Mutasi Masuk	
Penambahan Hibah Masuk	
Penambahan Hutang Persediaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Persediaan	
Pengurangan Koreksi Saldo Awal	
Pengurangan Mutasi Keluar	
Pengurangan Hibah Keluar	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Ekstrakomptabel	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
Pencatatan Persediaan Akhir	55.004.500,00
Selisih	55.004.500,00

b. Beban Jasa

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Jasa	2.197.849.666,00	2.196.155.290,00	(1.694.376,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Jasa	5.786.052,00
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	

Uraian	(Rp)
Penambahan Reklas dari Beban Dibayar di Muka	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Jasa	4.091.676,00
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Dibayar di Muka	
Selisih	(1.694.376,00)

c. Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan	242.148.120,00	242.148.120,00	-

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

d. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas	913.335.957,00	913.335.957,00	-

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Perjalanan Dinas	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	

Uraian	(Rp)
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

3. Beban Penyisihan Piutang

Selisih Beban Penyisihan Piutang LO dengan LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.007.211.958,09	-	2.007.211.958,09

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.007.211.958,09
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah atas penerimaan piutang	
Selisih	2.007.211.958,09

b. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	924.065.808,55	-	924.065.808,55

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - TP-TGR	

Uraian	(Rp)
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Pajak Daerah	924.065.808,55
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang BLUD	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang TPTGR	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
Selisih	924.065.808,55

3.2.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

1. Beban Penyusutan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	448.981.913,00	-	(448.981.913,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.077.539,00	-	(36.077.539,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi			-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-
Beban Penyusutan Aset Lainnya			-
Jumlah	485.059.452,00	-	(485.059.452,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyusutan th. 2021	485.059.452,00
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	485.059.452,00

2. Beban Amortisasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	53.800.000,00	-	53.800.000

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Amortisasi th. 2021	53.800.000,00
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	53.800.000,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 UMUM

Kabupaten Brebes memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berbeda saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusi, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB.

Adapun **fungsi** Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, adalah sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- c. pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang tugas fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;

- b. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
- c. Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan.
- 4. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan;
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan;
 - c. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Unit Pelaksana Teknis.

4.3 PERSONALIA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari 1 jabatan Kepala Badan (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 2 Kepala Bidang (eselon III.b), 2 kepala sub bagian dan 6 kepala sub bidang (eselon IV.a).

Jumlah keseluruhan pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam tahun 2021 sebanyak 50 orang, tersebar dalam 1 sekretariat dan 2 bidang, yaitu:

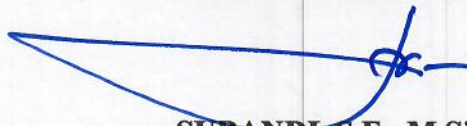
Bidang	Jumlah Pegawai		
	PNS	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat	10	-	6
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi	10	1	6
Bidang PBB dan BPHTB	8	1	7
Jumlah	28	2	19

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2021)

BAB V PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**



SUBANDI, S.E., M.Si

Pembina

NIP. 19690711 199103 1 010